



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN

**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PRATIKNO
2. Jabatan : MENTERI KOORDINATOR BIDANG PMK
3. NHK : 180183

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 7.925.608.587**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m<sup>2</sup>/112 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.254.474.687
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.788.429.218
3. Tanah dan Bangunan Seluas 851 m<sup>2</sup>/250 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.853.443.757
4. Tanah Seluas 552 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.029.260.925

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 610.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS HATCHBACK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 772.226.700**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. 450.187.638**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 13.562.546.056**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. 522.819.585**



Sub Total	Rp.	23.843.388.566
III. HUTANG	Rp.	1.093.770.192
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.749.618.374

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.